

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN UKURAN LEGISLATIF
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung)**

SKRIPSI



**Nama : Ramania
NIM : 222017291**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

SKRIPSI

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN UKURAN LEGISLATIF
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung)**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Ramania
NIM : 222017291**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramania
NIM : 222017291
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul : Pengaruh Transparansi dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung)

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kacuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2021


6000
RUBAH RUPIAH
Ramania

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Transparansi dan Ukuran Legislatif Terhadap
Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung)
Nama : Ramania
NIM : 222017291
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

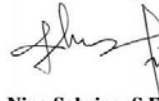
Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2021

Pembimbing I,



Drs. Sunardi, S.E., M.Si.
NIDN/NBM : 0206046303/784021

Pembimbing II,



Nina Sabrina, S.E., M.Si.
NIDN/NBM : 0216056801/851119

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Jangan Membandingkan Prosesmu Dengan Orang Lain Karena Bunga Tidak
Tumbuh dan Mekar Secara Bersamaan”*

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Bapak (M. Untung) dan Umak (Hamidah) Tercinta*
- ❖ Ayukku (Agustina Ningsih) dan Keluarga Kecilnya*
- ❖ Adikku (Khairunnisa) Tersayang*
- ❖ Seluruh Keluarga Besariku*
- ❖ Almamaterku*



PRAKATA

Assalamuikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan nikmat hidup dan segala karunia-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Transparansi dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung)”**, sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammdiyah Palembang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, pembimbing, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang selalu memberikan rezeki dan nikmat baik kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis dan kedua orang tuaku Bapak Untung dan Ibu Hamidah yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan senantiasa memberikan semangat, serta doa yang tiada hentinya bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si dan Ibu Nina Sabrina S.E., M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran yang tulus dan ikhlas. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E., M.Si., Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dinarossi Utami, S.E., M.Si. selaku Kepala galeri investasi BEI Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Rara Lida, Yuk Vinni, Adinda, Dinda Chan, Miraniyah, Ike dan Teman-teman CA.2.2017 serta teman lainnya yang telah kebersamai dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas budi baik untukseluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Palembang, Februari 2021

Ramania

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	12
A. Landasan Teori	12
1. Teori Umum (<i>Grand Theory</i>).....	12

a. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	12
2. Kinerja Pemerintah Daerah.....	13
a. Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah	13
b. Pengukuran Kinerja Pemerintah	14
c. Tujuan Pengukuran Kinerja	15
d. Manfaat Pengukuran Kinerja	16
e. Indikator Kinerja Berdasarkan Ekonomi	17
f. Rumus Menghitung Ekonomi.....	18
3. Transparansi.....	19
a. Definisi Transparansi	19
b. Pentingnya Transparansi.....	20
c. Tujuan Transparansi.....	21
d. Manfaat Transparansi.....	22
e. Indikator Transparansi	22
f. Rumus Indeks Transparansi.....	23
g. Pedoman Pemberian Skor	24
4. Ukuran Legislatif	25
a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25
b. Fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26
c. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27
d. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	28
e. Indikator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	28
C. Kerangka Pemikiran	35

1. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	35
2. Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	36
D. Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Operasionalisasi Variabel	40
D. Populasi dan Sampel.....	41
1. Populasi	41
2. Sampel	41
E. Data yang Digunakan.....	42
F. Metode Pengumpulan Data	43
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	45
1. Analisis Data.....	45
2. Teknik Analisis.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian.....	53
1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.....	53
a. Sejarah Singkat dan Teta Letak Geografis.....	53
b. Visi dan Misi.....	54
c. Demografis.....	56
2. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Lampung	56
a. Sejarah Singkat dan Tata Letak Geografis.....	56

b. Visi dan Misi.....	57
c. Demografis.....	58
3. Data yang Diolahkan	59
4. Hasil Pengelolaan Data.....	60
a. Statistik Deskriptif	60
b. Uji Asumsi Klasik.....	61
c. Asumsi Regresi Linear Berganda.....	65
d. Uji Hipotesis	66
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	70
1. Pengaruh Transparansi dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	70
2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	71
3. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	72
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Selatan dan Lampung	8
Tabel II.1 Kriteria Ekonomis	19
TabelII. 2 Tingkat Kategori Keterbukaan Informasi.....	23
TabelII. 2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya	30
Tabel III. 1 Operasionalisasi Variabel	40
TabelIII. 2 Populasi Provinsi Sumatra Selatan dan Lampung.....	41
Tabel III. 3 Sampel Provinsi Sumatra Selatan dan Lampung	42
Tabel IV. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Selatan	56
Tabel IV. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	58
Tabel IV. 3 Data yang Dibutuhkan	59
Tabel IV. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif	61
Tabel IV. 5 Hasil Uji Normalitas (Normalitas Kolmogorov-Smirnov)	62
Tabel IV. 6 Hasil Uji Multikolinearitas Metode <i>Scatterplot</i>	62
Tabel IV. 7 Hasil Uji Autokorelasi	64
Tabel IV. 8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	65
Tabel IV. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	66
Tabel IV. 10 Hasil Uji Secara Simultan (Uji F).....	67
Tabel IV. 11 Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran	38
Gambar IV. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data yang Diperlukan

Lampiran 2 Output Hasil SPSS

Lampiran 3 Surat Selesai Riset

Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Fotocopy Abstrak

Lampiran 6 Sertifikat Membaca dan Menghapal Al-Qur'an (Surat Pendek)

Lampiran 7 Sertifikat Pelatihan SPSS

Lampiran 8 Sertifikat Fotocopy Plagiarism Chacker X Originality Report

Lampiran 9 Sertifikat yang Dimiliki

Lampiran 10 Biodata Penulis

ABSTRAK

Ramania/222017291/2021/Pengaruh Transparansi dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Jenis penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 32 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD), jumlah anggota legislatif, anggaran dan realisasi belanja daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan regresi liner berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan transparansi dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Secara persial variabel tranparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Sedangkan, variabel ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung

Kata Kunci: Transparansi, Ukuran Legislatif, dan Kinerja Pemerintah Daerah

Abstract

Ramania/222017291/2021/The Influence of Transparency And Legislative Size on Local Governments performance

This study aimed to determine the influence of transparency and legislative size on local governments' performance districts or cities of South Sumatera Province and Lampung Province. The type of this research used was associative research. The numbers of the population in this research were 32 districts or cities in South Sumatra and Lampung provinces. The data collection method used was documentation. The data used was secondary in the form of evaluation of local government administration performance, the number of legislative members, the realization of the local government budget. The data analysis technique used was quantitative. Data analysis techniques used multiple linear regression. The results showed that transparency and legislative size affected local government performance districts or cities of South Sumatera Province and Lampung Province. Partially transparency affected on local government performance districts or cities of South Sumatera Province and Lampung Province. While, the legislative size no affected the local government performance districts or cities of South Sumatera Province and Lampung Province.

Keywords: transparency, legislative measures, and local government performance.

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
A64	Ramania	222017291	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era otonomi daerah di Indonesia mulai sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Undang-undang ini memberikan hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat daerah tersebut.

Pemerintah berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 diharapkan mampu mendorong terwujudnya *good governance*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*), dan evaluasi kinerja.

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Arifin 2020: 107).

Organisasi pemerintah sering dipandang sebagai organisasi yang memiliki kinerja kurang baik. Orang-orang di dalam organisasi pemerintahan sering dianggap lamban dalam berkerja, sering mengalami berbagai kerugian dan pemborosan, tidak efisien, tidak efektif, dan tidak produktif di dalam melaksanakan kegiatannya (Iwan dan Ardeno 2020: 4)

Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (Dailibas, dkk 2010: 11). Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah (Mardiasmo 2018: 238).

Dengan melakukan pengukuran kinerja berbasis *value for money* akan diperoleh gambaran terkait ketercapaian program kerja dalam mencapai layanan publik, dan bukan sekedar mengukur tingkat serapan anggaran. Maka untuk mengukur ketercapaian program kerja dan anggaran tersebut adalah dengan pengukuran kinerja berbasis *value for money* atau sering disebut dengan kinerja *triple E* yaitu Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas (Mahsun 2019: 9.1).

Dari sudut pandang audit kinerja, konsep ekonomi merupakan konsep paling sederhana dibandingkan dengan konsep efisiensi dan efektivitas. Dalam hal ini, konsep ekonomi semata-mata dilihat dari pengeluaran uang yang dilakukan, dengan memperhatikan prosedur pelaksanaan dan

pertanggungjawaban pengeluaran tersebut (I Gusti Agung Rai 2008: 22). Entitas pemerintah dinilai memiliki kinerja yang baik dari aspek ekonomi apabila entitas pemerintah dapat memperoleh *input* dengan harga yang minimal, dengan tetap mempertimbangkan aspek kualitas *input* (Iwan dan Ardeno 2020: 14).

Ekonomi adalah pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi berkaitan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Mardiasmo 2018: 5).

Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkat pencapaian hasil, dikaitkan dengan visi dan misi organisasi, serta dampak positif dan negatif yang diakibatkan dari suatu kebijakan operasional yang telah diambil (Dailibas, dkk 2010: 13).

Upaya pemerintah memberikan informasi kinerja didorong dengan adanya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bahwa keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu

yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi lainnya yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan (Arifin 2020: 109).

Selain transparansi diperlukan juga pengawasan oleh badan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif meliputi DPR dan DPRD. DPR dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif (Baldrick 2017: 65). DPRD merupakan lembaga representasi rakyat di daerah, berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjalankan fungsi legislasi, *budget*, dan pengawasan (Fakhry 2019: 2).

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang (Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 155).

Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung Sunarto meminta Pemprov Lampung untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya kesehatan terhadap dana jaminan kesehatan nasional pada Pemkab Lampung Barat dan Pemkab Way Kanan. Selain itu, kinerja atas pengelolaan dana desa pada Pemkab Lampung Selatan, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, dan Pemkab Pasawaran. “Kami mengapresiasi segala usaha yang telah dilakukan seluruh jajaran Pemprov Lampung dan pemerintahan Kabupaten/kota di Provinsi Lampung. LHP ini merupakan bahan dalam meningkatkan kinerja terhadap mutu pelayanan kepada masyarakat yang mampu berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat lampung,” ujar Sunarto (<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pk1gvw430>).

Berkait dengan pemborosan dana Prima Irmansyah Permana menyatakan bahwa pemeliharaan berkala jalan Imam Bonjol di kota Metro Pusat dianggap sia-sia oleh masyarakat lantaran dianggap kualitasnya buruk dan hanya pemborosan anggaran saja. Terpisah, Ketua Lambaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Kinerja Aparatur Nagara (Perkara) DPD Provinsi Lampung, Hendrik menilai bahwa seharusnya pemerintah intens dalam melakukan pengawasan terhadap setiap proses pekerjaan. “Seharusnya ini di evaluasi, karena terkasan menghamburkan uang. Masak jalan masih bagus, mulus, di lapis lagi tapi lapisannya terkasan asal-asalan begini,” ungkapnya (<https://radarlampung.co.id>).

Nunik Handayani menyatakan bahwa ada kejanggalan hasil pemeriksaan audit keuangan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun sayangnya pada LHP Nomor 26A/LHP/XVIII.PLG/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 untuk Kabupaten Banyuasin ini tidak melampirkan Buku II dan Buku III yang berupa penjabaran dari temuan hasil pemeriksaan pada sistem pengendalian intern serta penjabaran dari hasil temuan pada Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (<https://jurnalsumatra.com>).

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bambang (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Pardomuan dan Ade (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi dan Suwardi (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami & Mutoriogh (2020) hasil penelitian menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Saragih dan Setyaningrum (2015) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legislatif berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan

Fikri, Einde, dan Rindu (2019) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Vegy dan Vanica (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak pada pulau Sumatera bagian Selatan dengan Kota Palembang sebagai ibukotanya. Saat ini Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari empat kota, yaitu Kota Palembang, Prabumulih, Pagar Alam dan Lubuk Linggau dan tiga belas Kabupaten. Sedangkan, Provinsi Lampung merupakan sebuah Provinsi yang terletak pada pulau Sumatera bagian Selatan dengan Kota Bandar Lampung sebagai ibukotanya. Lampung terdiri dari dua Kota, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dan tiga belas Kabupaten. Guna meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung menerapkan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 untuk seluruh Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat daerah tersebut. Serta berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahannya guna menghasilkan kinerja pemerintah yang baik untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

Tabel I.1
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Selatan dan Lampung

No	Kabupaten/Kota	Transparansi (X ₁)	Ukuran Legislatif (X ₂)	Kinerja Pemerintah Daerah (Y)
	Sumatera Selatan			
1	Musi Rawas	98%	40	98,03%
2	Ogan Komering Ulu Selatan	98%	40	94,22%
3	Lahat	95%	40	99,78%
4	Muara Enim	95%	46	100,71%
5	Lubuk Linggau	95%	30	98,99%
6	Empat Lawang	95%	35	101,71%
7	Musi Banyuasin	93%	45	92,34%
8	Ogan Komering Ilir	93%	45	85,60%
9	Palembang	93%	50	95,94%
10	Banyuasin	90%	45	97,86%
11	Ogan Komering Ulu Timur	90%	45	97,71%
12	Pagar Alam	85%	25	79,31%
13	Prabumulih	83%	25	97,50%
14	Musi Rawas Utara	83%	25	90,02%
15	Ogan Ilir	80%	40	88,82%
16	Ogan Komering Ulu	75%	35	96,96%
17	Penukal Abab Lematang Ilir	68%	25	86,01%
	Lampung			
18	Lampung Barat	98%	35	96,94%
19	Pasawaran	98%	45	97,87%
20	Way Kanan	98%	40	99,81%
21	Pringsewu	98%	40	94,95%
22	Tulang Bawang	95%	47	89,80%
23	Bandar Lampung	95%	50	90,06%
24	Lampung Timur	93%	50	93,98%
25	Lampung Tengah	93%	50	82,12%
26	Lampung Selatan	88%	50	90,62%
27	Tulang Bawang Barat	88%	30	87,16%
28	Metro	80%	25	97,19%
29	Tanggamus	80%	45	92,82%
30	Mesuji	80%	35	91,70%
31	Pesisir Barat	78%	25	98,51%
32	Lampung Utara	75%	45	89,38%

Sumber: Kemendagri, BPS, DJPK (data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel I.1 menunjukkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim dan Empat Lawang dilihat dari tingkat ekonomi sebesar 100,71% dan 101,71% yang artinya pemerintah daerah tersebut masuk dalam kategori tidak ekonomis. Tetapi, Dengan kinerja tersebut Kabupaten Muara Enim dan Empat Lawang memiliki indeks transparansi yaitu sama-sama sebesar 95% yang masuk dalam kategori ekstensif dengan tingkat keterbukaan cukup terbuka. Selanjutnya dilihat dari jumlah anggota legislatif Kabupaten Muara Enim sebanyak 46 orang dan Kabupeten Empat Lawang sebanyak 35 orang, semakin banyak anggota DPRD maka diharapkan semakin mudah dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggraan pemerintah daerah tersebut.

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan didukung adanya transparansi yang akan memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Serta, semakin banyak anggota legislatif diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi DPRD terhadap penyelenggraan pemerintah daerah agar menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang baik.

Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh transparansi dan ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Bagaimanakah pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Bagaimanakah pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh transparansi dan ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan sebagai evaluasi dimasa mendatang mengenai pengaruh transparansi dan ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Bagi almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2008). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim, Yanuar, dan Wayan (2010). *Seri Bunga Rampai Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Akhmad (2019). *Manajemen keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Azkiya Publishing.
- Arifin Tahir (2020). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Cetakan Ketiga. Bandung : Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Di akses 22 Desember 2020, Dari <https://lampung.bps.go.id/publication/2018/08/11/9f3e06a09ebc3306f2f013c0/provinsi-lampung-dalam-angka-2018.html>
- Badan Pusat Statistik. 2018. Di akses 22 Desember 2020, Dari <https://sumsel.bps.go.id/publication/2017/08/12/5b5a8993710ce0d0e356fdfc/provinsi-sumatera-selatan-dalam-angka-2018.html>
- Baldric Siregar (2017). *Akuntansi sektor publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Bambang Jatmiko (2020). pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintahan daerah kabupaten sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. Vol.7, No.2. ISSN: 2339-0832.
- Dailibas, Raden Nasution, Dadang Suwanda (2010). *Panduan Penyusunan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*. Yogyakarta : Cv. Absolute Media.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2018. Diakses 25 Oktober 2020, dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>.
- Dwi Afrianti, Harpanto Guno Sabanu, dan Fahrizal Noor. 2015. Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal BPR RI. Indonesia*. Vol. 1, No 1, Hal. 21-42.
- Evi Damayanti, Suwardi Bambang Hermanto (2018, Maret). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.7, No.3. e-ISSN: 2460-0585.

- Fakhry Zamzam (2019). *Good Governance Sekretariat DPRD*. Yogyakarta : Deepublish.
- Fikri Rizki Utama, Einde Evana, dan Rindu Rika Gamayuni (2019). *the effect of local government characteristics on performance of local government administration. International Research Journal of Business Studie*. Vol.12, No.2. ISSN: 2089-6271.
- Fitriya Fauzi, Abdul Basyith Dencik, Diah Isnaini Asiati (2019). *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi Aplikasi SPSS dan Eviews untuk Teknik Analisis Data*. Jakarta : Salemba Empat.
- Freddy Poernomo (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Grahita Chandrarin (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif. Cetakan kedua*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hendra Karianga (2013). *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Kencana.
- Hidayah Saragih dan Dyah Setyaningrum (2015). Pengaruh pengawasan fungsional dan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah di indonesia tahun 2011-2012. 1-26.
- Hilmy Mochtar (2011). *Demokrasi dan Politik Lokal di Kota Santri*. Malang : UB Press.
- IBP. 2019. Open Budget Survey 2019. Diakses 5 Maret 2021, dari <https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/open-budget-survey-2019-OBReport.pdf>
- I Gusti Agung Rai (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik Konsep, Prektik, dan Studi Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Iwan Novarian Sutawijaya dan Ardeno Kurniawan (2020). *Audit Kinerja Mendorong Peningkatan Value Organisasi Pemerintah dalam Mewujudkan World Class Government*. Yogyakarta : ANDI.
- Jason M. Patlis (2004). *Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Hutan*. Bogor : Center for International Forestry Research.
- Kementrian Dalam Negri. 2018. Diakses 20 Oktober 2020, dari <http://otda.kemendagri.go.id/wp-content/upload/2019/05/kepmendari-EKPPD-Thdp-LPPD-2018>

- Kesumayuda (2019, September). Bonjol Kota Metro Terkesan Sia-sia. Diakses 12 Oktober 2021, diakses <https://radarlampung.co.id/2019/09/04/pemeliharaan-jalan-imam-bonjol-kota-metro-terkesan-sia-sia/>
- M. Arzandi, Bayu, Dinar, Soly, dan Galuh (2015). *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang*. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET.
- Mahmudi (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta : ANDI.
- Mohammad Mahsun (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Muhammad Fitri Rahmadana, Arin Tentrem Mawati Nurhayati Siagian, Mori Agustina Peraangin-angin John Refelino, Moch (2020). *Pelayanan publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Mursalin Yasland, Muhammad Hafil (2018, Desember). BPK Meminta Pemprov lampung tingkatkan Kinerja. Diakses 10 Oktober 2020, dari <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pk1gww430>
- Nikolaus Duli (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Berupa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta : Deepublish.
- Nunik Handayani (2018, Juni). Pemeriksaan BPK RI Terhadap Kabupaten banyuasin Janggal. Diakses 25 Oktober 2020, dari <https://jurnalsumatra.com/pemeriksaan-bpk-ri-terhadap-kabupaten-banyuasin-janggal/>
- Nurkholis & Moh. Khusaini (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang : UB Press.
- Pardomuan Robinson Sihombing, Ade Marsinta Arsani (2020). Pengaruh transparansi, LKPD, dan PAD terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ecodemica*. Vol.4, No.2. ISSN: 2355-0295.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Romie Priyastama (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS*. Yogyakarta: Start Up.

- Siti Marwiyah (2018). *Kepemimpinan Spiritual Profetik dalam Pencegahan Korupsi*. Surabaya : Jakad publishing surabaya.
- Slamet Riyanto & Aglis Andhita Hatmawan (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Penelitian di bidang manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta : Deepublish.
- Soemarso S.R. 2019. *Etika dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: Salamba Empat.
- Sunardi, Nur May Lena, Jovan Febriantoko (2020). *Camparison of Transparency Index Between Regency and City in South Sumatera and Lampung Province. Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi*. Vol. 15, No. 2. P-ISSN1858-165X/e-ISSN 2528-7672.
- Syofian Siregar (2017). *Metode penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta : Kencana.
- Uma Sekaran & Roger Bougie (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis. Buku 2 Edisi enam*. Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Utami Puji Lestari & Mutariqoh (2020). Pengaruh sistem akuntansi kauangan daerah, akuntabilitas, transparansi, *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi kasus OPD Kabupaten Kendal). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*. Vol. 7, No.1 ISSN: 2356-2439.
- V. Wiratna Sujarweni (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- V. Wiratna Sujarweni (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka baru press.
- Vegy Gustianra dan Vanica Serly (2019). Pengaruh *good goverment governance* dan ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang terdapat pada *Indonesia Government Indexs* tahun 2014). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol. 1, No.3. hal 1426-1442.